

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
TAHUN ANGGARAN : 2026

PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
KODE PROGRAM	1.01.02								
KEGIATAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								
SUB KEGIATAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan								
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). a. "Peraturan-Peraturan : Menteri Pendidikan Nasional No. 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan" "Memperhatikan data jumlah peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan per kabupaten/kota di Kaltim: -Samarinda (Laki : 12,634 Perempuan : 10,309) -Bontang (Laki : 2,800 Perempuan : 1,524) -Balikpapan (Laki : 10,764 Perempuan : 7,992) -PPU (Laki : 2,753 Perempuan : 1,812) -Paser (Laki : 2,663 Perempuan : 2,125) -Mahulu (Laki : 62 Perempuan : 55) -Kutim (Laki : 4,619 Perempuan : 3,215) -Kukar (Laki : 9,100 Perempuan : 5,400) -Kubar (Laki : 1,818 Perempuan : 1,380) -Berau (Laki : 2,300 Perempuan : 1,607)" 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan : 1) "Akses : Belum semua guru dan tenaga kependidikan, terutama perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS. Sebagian besar posisi pengelola BOS seperti kepala sekolah, bendahara, atau ketua tim masih dipegang oleh laki-laki." "Partisipasi : Keterlibatan perempuan dalam rapat perencanaan atau pengambilan keputusan penggunaan BOS masih terbatas. Biasanya guru perempuan hanya dilibatkan dalam tahap pelaksanaan kegiatan, bukan pada tahap perencanaan anggaran. Hal ini menyebabkan gagasan dan pengalaman mereka belum sepenuhnya ikut membentuk kebijakan penggunaan dana sekolah." "Kontrol : Kewenangan dalam menentukan prioritas dan pelaksanaan kegiatan BOS masih lebih banyak dipegang oleh laki-laki. Guru perempuan umumnya belum memiliki peran pengawasan atau pengambilan keputusan strategis terkait dana BOS." "Manfaat : Dana BOS sudah memberikan manfaat besar untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar. Namun, manfaatnya belum sepenuhnya merata. Beberapa kebutuhan penting seperti sanitasi yang memadai untuk siswi, ruang ganti, atau sarana belajar yang aman dan nyaman, belum menjadi perhatian utama dalam penggunaan BOS." b. Penyebab Internal : 1) "1. Tim pengelola BOS masih didominasi oleh laki-laki. 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) belum disusun dengan memperhatikan kebutuhan berdasarkan gender. 3. Pemahaman guru dan kepala sekolah tentang penganggaran responsif gender masih terbatas." c. Penyebab Eksternal : 1) "1. Budaya masyarakat masih menganggap pengelolaan dana dan keputusan teknis lebih cocok dilakukan oleh laki-laki. 2. Sosialisasi tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pengelolaan dana pendidikan masih jarang dilakukan. 3. Belum ada aturan teknis yang mendorong sekolah untuk melaporkan penggunaan dana berdasarkan analisis gender."								
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur Tujuan : Mendukung operasional sekolah dan peningkatan mutu pembelajaran di SMK melalui pengelolaan dana BOS yang transparan, efektif, dan adil bagi seluruh warga sekolah. a. Mewujudkan pengelolaan dana BOS yang lebih terbuka, melibatkan semua pihak, dan memperhatikan kebutuhan guru serta siswa baik laki-laki maupun perempuan agar manfaatnya dirasakan secara adil oleh seluruh warga sekolah. 2. Indikator dan Target Kinerja a. "Output: RKAS disusun dengan melibatkan guru laki-laki dan perempuan secara setara" "Outcome: Guru perempuan aktif dalam pengambilan keputusan penggunaan BOS" "Dampak: Kebutuhan seluruh warga sekolah diakomodasi secara adil" "Impact: Sekolah memiliki sistem pengelolaan dana yang transparan dan responsif gender"								
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 152.109.770.000								
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	"1. Melibatkan guru dan tenaga kependidikan perempuan dalam perencanaan dan pengawasan BOS. 2. Menyusun RKAS yang mempertimbangkan kebutuhan semua pihak, termasuk aspek kenyamanan dan keamanan bagi siswa perempuan. 3. Menyelenggarakan pelatihan pengelolaan keuangan sekolah yang responsif gender. 4. Mendorong kepala sekolah dan bendahara melaporkan kegiatan BOS dengan data yang terpilah berdasarkan gender. 5. Memastikan fasilitas yang dibiayai BOS mendukung lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua siswa." <table><tr><td>Masukan</td><td>Rp. 0</td></tr><tr><td>Keluaran</td><td>-</td></tr><tr><td>Hasil</td><td>-</td></tr></table>		Masukan	Rp. 0	Keluaran	-	Hasil	-
Masukan	Rp. 0								
Keluaran	-								
Hasil	-								

Samarinda, 03 Juni 2026

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


 Armin, S.Pd., M.Pd
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 197012311997021008